

LAPORAN KEUANGAN UAKPA TAHUN 2025 AUDITED



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
654514**

KOMISI PEMILIHAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Meidy Ronny Malonda

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado 95112

website : <https://kpu.sulut.go.id>

e-mail : prov_sulut@kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Manado, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Meidy Ronny Malonda

NIP 196905141997021001

Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.260.749.134,-** atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar **Rp.24.997.971.192,-** atau mencapai 99.93% dari alokasi anggaran sebesar **Rp.25.014.989.000,-**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp.30.747.976.300,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp.0,-** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp.30.747.976.300,-** Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp.21.035.487,-** dan Aset Tetap Lainnya (neto) sebesar **Rp.5.000.000,-**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.30.774.011.787,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.2.273.466,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.27.146.261.543,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.27.143.988.077,-** Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp.245.347.168,-** dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp.26.898.640.909,-**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp.46.393.751.255,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp.26.898.640.909,-** dikurangi Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar **Rp.3.890.687.185,-** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.15.169.588.626,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp.30.774.011.787,-**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	260.749.134	260.749.134	-	46.328.323
JUMLAH PENDAPATAN		-	260.749.134	260.749.134	-	46.328.323
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	6.531.929.000	6.528.272.484	(3.656.516)	99,94	5.346.560.007
Belanja Barang	B.4	18.252.016.000	18.240.130.045	(11.885.955)	99,93	104.599.287.644
Belanja Modal	B.5	231.044.000	229.568.663	(1.475.337)	99,36	1.728.095.540
Jumlah Belanja		25.014.989.000	24.997.971.192	(17.017.808)	99,93	111.673.943.191

II. NERACA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	13.702.021.108
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.3	-	749.089.333
Persediaan	C.1.4	-	534.000
Jumlah Aset Lancar		-	14.451.644.441
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	22.916.146.000	22.916.146.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	9.792.750.107	10.320.097.583
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.806.806.000	5.806.806.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	1.000.000	1.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.5	98.002.175	98.002.175
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(7.866.727.982)	(7.289.449.616)
Jumlah Aset Tetap		30.747.976.300	31.852.602.142
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	135.391.291	194.674.221
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.2	(114.355.804)	(973.374)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		21.035.487	193.700.847
ASET LAINNYA	C.4		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.1	-	190.180.378
Aset Lain-Lain	C.4.2	977.419.439	76.509.300
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(972.419.439)	(71.109.300)
Jumlah Aset Lainnya		5.000.000	195.580.378
JUMLAH ASET		30.774.011.787	46.693.527.808
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	183.479.762
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.3	-	116.296.791
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	299.776.553
JUMLAH KEWAJIBAN		-	299.776.553
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	30.774.011.787	46.393.751.255
JUMLAH EKUITAS		30.774.011.787	46.393.751.255
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30.774.011.787	46.693.527.808

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.273.466	17.573.227
JUMLAH PENDAPATAN		2.273.466	17.573.227
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.528.272.484	5.342.456.007
Beban Persediaan	D.3	-	1.634.333.320
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.649.062.650	60.515.200.651
Beban Pemeliharaan	D.5	797.876.223	1.126.487.410
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.548.981.121	34.359.793.943
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.449.789.705	1.380.812.757
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	172.279.360	(990)
JUMLAH BEBAN		27.146.261.543	104.359.083.098
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27.143.988.077)	(104.341.509.871)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional		245.347.168	23.097.990
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		245.881.168	28.557.096
Beban dari Kegiatan Non Operasional		534.000	5.459.106
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	245.347.168	23.097.990
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(26.898.640.909)	(104.318.411.881)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(26.898.640.909)	(104.318.411.881)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	46.393.751.255	31.130.584.634
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(26.898.640.909)	(104.318.411.881)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(3.890.687.185)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	115.195.200	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	(4.005.882.385)	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15.169.588.626	119.581.578.502
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(15.619.739.468)	15.263.166.621
EKUITAS AKHIR	E.6	30.774.011.787	46.393.751.255

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Kebijakan Teknis KPU Provinsi Sulawesi Utara

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi

PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Secara struktur KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan koordinator dari 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang terdiri dari 4 KPU Kota dan 11 KPU Kabupaten. Dalam menjalankan Tugas dan wewenangnya KPU mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pegawai Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai yang Dipekerjakan dan Pegawai Organik KPU.

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan

akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

Untuk menjalankan tugas tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel . Sumber Daya Manusia

a.berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Kantor (Sekretaris)	1	-	-	-	1
2	Jabatan Fungsional	2	-	-	-	2
3	Bagian Keuangan, Umum & Logistik	2	9	1	-	12
4	Bagian Perencanaan, Data	1	6	-	-	7
5	Bagian SDM, Humas dan Teknis Penyelenggara Pemilu	1	9	-	-	10
	Jumlah	7	24	1	-	32

b. berdasarkan jabatan Struktural

No	Unit Kerja	ESELON				Jlh
		II.A	III.A	IV.A	Pelaksana	
1	Kepala Kantor (Sekretaris)	1	-	-	-	1
2	Bagian Keuangan, Umum & Logistik	-	1	2	9	12
3	Bagian Perencanaan, Data	-	1	2	4	7
4	Bagian SDM, Humas dan Teknis Penyelenggara Pemilu	-	1	2	7	10
5	Fungsional	-	2	-	-	2
	Jumlah	1	3	6	20	32

Jumlah pegawai seluruhnya adalah 32 pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala kantor, 2 orang Jabatan Fungsional, 3 Kepala Bagian, 6 Kepala Sub bagian dan 20 pegawai pelaksana yang tersebar pada Subbagian.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

KPU Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Pendapatan (1) Pendapatan- LRA

-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan

-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan

atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *KPU PROVINSI SULAWESI UTARA* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pada belanja barang (revisi DJA), revisi dana hibah Pilkada ke DIPA (belanja barang dan belanja modal), dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5.211.747.000	6.531.929.000
Belanja Barang	15.479.210.000	18.252.016.000
Belanja Modal	0	231.044.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	20.690.957.000	25.014.989.000

Realisasi

Pendapatan

Rp.260.749.134,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp260.749.134,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,. Pendapatan KPU Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari setoran TGR, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun anggaran yang lalu, pendapatan jasa Giro atas rekening Hibah dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Giro	-	19.745	100%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	2.253.721	100%
Penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL	-	1.000.000	100%
Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	-	244.711.168	100%
Pendapatan Penyelesaian TGR	-	12.764.500	100%
Jumlah	-	260.749.134	100%

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.749.134	46.328.323	463%
Jumlah	260.749.134	46.328.323	463%

Rincian Pendapatan

No	Uraian	NPTN	Tanggal setor	Nilai
1	Pendapatan Jasa Giro	8FE9E48VVO72UJGO	24/06/2025	349
		089361JNG8CC7223	05/05/2025	19.356
		2AE916U8F7QR6HC	14/05/2025	16
		7111C48VVO437P9T	23/05/2025	6
		A4BF21JNG8CSVFOJ	22/05/2025	18
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	259991302006364	06/02/2025	950.902
		154686U8F7RBTBOK	27/05/2025	177.459
		269CF3CIFTHQ9NQJ	27/05/2025	180.810
		6768D55DFIS8IEMJ	17/07/2025	171.990
		Potongan SPM No 00493T	30/12/2025	772.560
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	D5E556U8F7IANDTB	24/02/2025	1.000.000
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	BEE5B2G502J48L4H	14/01/2025	5.000.000
		D29351JNG80NRKR8	14/01/2025	2.000.000
		D8C7148VVNNS1CSR	14/01/2025	5.140.900
		00B3861QVCSLV4UB	15/01/2025	4.386.800
		0CFC07QLV21EOUSO	15/01/2025	1.500.000
		170B348VVNNT3MBR	15/01/2025	4.550.000
		32ADE3CIFT5GMNH5	15/01/2025	6.500.000
		442DD1JNG80NSPK0	15/01/2025	2.000.000
		81CBE1JNG80NSQ7J	15/01/2025	500.000
		82D6A3CIFT5FK28S	15/01/2025	663.400
		9231461QVCSLT8RM	15/01/2025	4.550.000
		963BD0NA0DEBFPVB	15/01/2025	920.000
		A1B911JNG80NQATC	15/01/2025	1.000.000
		BAFC87QLV21DL2TH	15/01/2025	4.508.000
		BE33D0NA0DECJ06D	15/01/2025	1.062.500
		3140361QVCSRDAT6	20/01/2025	2.500.000
		3646F3CIFT5ODMIJ	22/01/2025	500.000
		F031A48VVNO0I5UG	22/01/2025	2.000.000
		56F7C2G502JJHETD	30/01/2025	1.563.400
		8E6CF6U8F7FHFP6V	30/01/2025	1.312.500
		24DCA7QLV24489U2	04/02/2025	101.000
		F2DD97QLV24E9OUO	14/02/2025	9.906.555
		04EC07QLV24KR7QR	21/02/2025	386.400

		11A3B55DFIDFMAS8	21/02/2025	2.196.800
		5CA3C48VVNR39CH6	21/02/2025	2.372.000
		6C5B83CIFT8MS7P7	21/02/2025	3.263.400
		86E6E1JNG83U0OEJ	21/02/2025	112.500
		9A55A3CIFT8MRRST	21/02/2025	3.865.203
		A845948VVNR36VAK	21/02/2025	10.268.384
		AF52461QVCVS0RTQ	21/02/2025	2.963.100
		CFCAE7QLV24KS5LN	21/02/2025	4.086.600
		DA0766U8F7I8F4R7	21/02/2025	973.600
		F54AA48VVNR38RD0	21/02/2025	3.990.000
		2C9B061QVCVS712T	22/02/2025	4.000.000
		333976U8F7I9H0KC	22/02/2025	2.000.000
		14BC32G502MAI9EI	23/02/2025	2.190.000
		2920A1JNG83U1RL9	23/02/2025	2.500.000
		417FC48VVNR4C587	23/02/2025	600.000
		88A656U8F7I9J074	23/02/2025	500.000
		B11192G502MAI9H0	23/02/2025	4.173.600
		C438D1JNG83V66I1	23/02/2025	2.096.800
		19D527QLV24N2LH9	24/02/2025	1.075.000
		3C9346U8F7IAO5G9	24/02/2025	676.800
		69CA63CIFT8OVHAI	24/02/2025	4.000.000
		83F4D7QLV24N4736	24/02/2025	1.642.359
		AE6153CIFT8P3B77	24/02/2025	3.321.599
		D95FC7QLV24N0HGU	24/02/2025	1.000.000
		E661E6U8F7IAKNCD	24/02/2025	2.153.000
		EBE762G502MCMAEG	24/02/2025	3.936.952
		FA1E448VVNR5EEQF	24/02/2025	4.073.004
		DDAE37QLV24O6LJQ	25/02/2025	1.000.000
		87A167QLV24PAC4K	26/02/2025	1.436.800
		420BB61QVD01IRVB	27/02/2025	1.000.000
		4C9EF0NA0DHN4NS9	27/02/2025	654.500
		5853C6U8F7IF3K9A	28/02/2025	8.014.984
		9964161QVD02M6IE	28/02/2025	1.900.000
		D604D3CIFT8TEUQ5	28/02/2025	1.670.000
		0B6587QLV272C7LK	03/03/2025	3.316.530
		4FB6A55DFIFS40E1	03/03/2025	853.400
		E74A36U8F7KM2TV2	04/03/2025	1.890.000
		10B5F55DFIFVGUCT	05/03/2025	1.500.000
		1B8926U8F7KN6O1T	05/03/2025	1.000.000
		211482G502OP45SO	05/03/2025	2.296.800
		5A3F16U8F7KO893C	05/03/2025	1.421.800
		B05D56U8F7KO89FA	05/03/2025	1.953.200
		C19BB0NA0DK0BSHA	05/03/2025	1.633.400
		3A0286U8F7KSMUFS	10/03/2025	6.767.700
		C43EC1JNG86KE5Q3	12/03/2025	1.286.800

		5BFBB0NA0DK81JG9	15/03/2025	1.000.000
		214022G502P32IP4	19/03/2025	4.000.000
		6664F1JNG86MLIQ2	19/03/2025	1.000.000
		A40882G502P7KJJH	19/03/2025	2.000.000
		D7FD93CIFTBK26CP	19/03/2025	1.000.000
		73BA87QLV27K7HNL	21/03/2025	2.250.000
		1AD9C6U8F7O9RU36	24/04/2025	1.683.400
		3E3B255DFIJH1THT	24/04/2025	9.891.116
		7A0C07QLV2ANDVCI	25/04/2025	1.344.000
		E52A361QVD8CJHRD	07/05/2025	13.441.054
		580390NA0DTIIBUR	29/06/2025	2.240.000
		9F8E61JNG8FUVB2M	29/06/2025	1.045.000
		CBA953CIFTKNPBIK	29/06/2025	1.642.200
		C4C3D48VVOCR11L	17/08/2025	650.000
		951CA48VVOOCBSCT	09/12/2025	550.000
		02DD548VVOOT2MBP	22/12/2025	4.000.000
		005CA1JNG91NSRV3	22/12/2025	2.544.400
		6875761QVDTN2JBE	23/12/2025	300.000
		28DCB8N3ETKS9T3D	23/12/2025	353.870
		BB54255DFJBALSVH	23/12/2025	980.000
		09B9748VVOOT4GI8	23/12/2025	496.900
		C69C53CIFU6HRIRN	23/12/2025	230.000
		B27C348VVOOU93KF	23/12/2025	1.700.000
		5466B48VVOOU8L7C	23/12/2025	993.900
		8E6F46U8F8G3FNEN	23/12/2025	2.258
		E29CC61QVDTN2INE	23/12/2025	1.093.900
		DB8398N3ETKR50MJ	23/12/2025	207.100
		ECE0348VVOOU95K2	23/12/2025	1.000.000
		5D52648VVOOU5HM2	23/12/2025	522.500
		EFC191JNG91P1KIB	23/12/2025	700.000
		458EA8N3ETKS76LP	23/12/2025	200.000
		4530848VVOOU86MC	23/12/2025	3.717.500
		CA19455DFJBAJ96T	23/12/2025	2.200.000
		4BF600NA0EFBGGLI	23/12/2025	496.900
		AA20C48VVOOU5M80	23/12/2025	2.100.000
		93CCD3CIFU6GNGQL	23/12/2025	957.100
5	Pendapatan Setoran TGR	F56EC7QLV2GLQ8EQ	29/06/2025	10.509.500
		00F4A61QVDHouc5Q	22/08/2025	1.000.000
		9D51B6U8F8A1LI1F	20/10/2025	1.070.000
		6C74F8N3ETEQLFH79	20/10/2025	185.000
TOTAL				260.749.134

Realisasi**Belanja**

Rp.24.997.971.192,-

B2. Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.24.997.971.192,- atau 99.93% dari anggaran belanja sebesar Rp.25.014.989.000,-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.531.929.000	6.528.272.484	99,94%
Belanja Barang	18.252.016.000	18.240.130.045	99,93%
Belanja Modal	231.044.000	229.568.663	99,36%
Total Belanja Kotor	25.014.989.000	24.997.971.192	99,93%
Pengembalian Belanja	0	0	0,00%
Jumlah	25.014.989.000	24.997.971.192	99,93%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 77.62% dibandingkan dengan periode 2024. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penurunan Belanja Barang dan Belanja Modal dikarenakan pada tahun 2025 tahapan Pemilihan hanya untuk kegiatan evaluasi.
2. Peningkatan Belanja Pegawai dikarenakan adanya pembayaran Gaji untuk PPPK dan CPNS yang diangkat di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dengan TA. 2024

Kode Jns Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	Rp	%
51	Belanja Pegawai	6.528.272.484	5.346.560.007	1.181.712.477	22,10%
52	Belanja Barang	18.240.130.045	104.599.287.644	-86.359.157.599	-82,56%
53	Belanja Modal	229.568.663	1.728.095.540	-1.498.526.877	-86,72%
Jumlah		24.997.971.192	111.673.943.191	-86.675.971.999	-77,62%

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp6.528.272.484,-

Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.528.272.484,- dan Rp.5.346.560.007,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 22.10 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Pada Tahun 2025 ada pembayaran gaji dan tunjangan untuk PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) TMT 2 Mei 2025 dan TMT 1 Oktober 2025

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik / (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.710.021.700	1.633.513.400	76.508.300	4,68%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.486	23.096	- 1.610	-6,97%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101.164.682	102.455.540	- 1.290.858	-1,26%
Belanja Tunj. Anak	29.198.196	29.196.402	1.794	0,01%
Belanja Tunj. Struktural PNS	126.140.000	125.010.000	1.130.000	0,90%
Belanja Tunj. Fungsional	36.148.000	36.148.000	-	0,00%
Belanja Tunj. PPh PNS	16.238.822	31.627.976	- 15.389.154	-48,66%
Belanja Tunj. Beras PNS	81.472.500	79.734.420	1.738.080	2,18%
Belanja Uang Makan PNS	236.022.000	36.670.000	199.352.000	543,64%
Belanja Tunjangan Umum PNS	59.975.000	52.030.000	7.945.000	15,27%
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.349.381.950	1.306.406.688	42.975.262	3,29%
Belanja Tunjangan Khusus PNS	1.987.117.083	1.802.477.824	184.639.259	10,24%
Belanja Gaji Pokok PPPK	358.603.332	57.664.800	300.938.532	521,88%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.311	278	4.033	1450,72%
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	14.985.360	-	14.985.360	#DIV/0!
Belanja Tunj. Anak PPPK	3.137.486	-	3.137.486	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	22.500.000	7.500.000	15.000.000	200,00%
Belanja Tunj. Beras PPPK	18.153.280	1.303.560	16.849.720	1292,59%
Belanja Uang Makan PPPK	85.481.000	407.000	85.074.000	20902,70%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	16.185.000	-	16.185.000	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Khusus PPPK	276.321.645	44.391.843	231.929.802	522,46%
Jumlah Belanja Pegawai	6.528.272.833	5.346.560.827	1.181.712.006	22,10%
Pengembalian beban pembulatan gaji PNS	349	820	- 471	0,00%
Jumlah Belanja Pegawai Netto	6.528.272.484	5.346.560.007	1.181.712.477	22,10%

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.18.240.130.045,-

Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.240.130.045,- dan Rp104.599.287.644,- Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan 51,62% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Di tahun 2025 anggaran Pilkada hanya untuk evaluasi kegiatan

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA. 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik / (Turun)	%
Barang Operasional (5211)	4.098.503.927	9.085.192.614	- 4.986.688.687	-54,89%
Barang Non Operasional (5212)	2.382.709.807	17.445.866.948	- 15.063.157.141	0,00%
Belanja Barang Pesediaan Konsumsi(5218)	-	8.388.689.103	- 8.388.689.103	-100,00%
Belanja Jasa (5221)	4.418.759.583	34.468.177.260	- 30.049.417.677	-87,18%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan(5231)	759.840.147	883.003.236	- 123.163.089	-13,95%
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	6.580.384.681	34.346.564.124	- 27.766.179.443	-80,84%
Jumlah Belanja Barang Netto	18.240.198.145	104.617.493.285	- 86.377.295.140	-82,56%
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	68.100	18.205.641	- 18.137.541	-99,63%
Jumlah Belanja Barang Netto	18.240.130.045	104.599.287.644	- 86.359.157.599	-82,56%

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin**

Rp.229.568.663,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp229.568.663,- dan Rp.1.728.095.540,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 87% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA. 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik / (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.568.663	1.728.095.540	- 1.498.526.877	-87%
Jumlah Belanja Modal Netto	229.568.663	1.728.095.540	- 1.498.526.877	-87%

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Nama Barang	Nilai Perolehan
1	Pengadaan Internet Starlink	23.700.000
2	Pengadaan 1 unit AC Standing	39.186.663
3	Pengadaan 1 Unit Komputer PC	17.500.000
4	Pengadaan 1 unit Laptop	29.500.000
5	Pengadaan 3 unit Printer EPSON	17.757.000
6.	Pengadaan 1 unit TV untuk PPID	10.128.000
7.	Pengadaan 4 unit PC	68.376.000
8.	Pengadaan 1 unit printer	3.663.000
9.	Pengadaan 1 unit PC	19.758.000
	TOTAL	229.568.663

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp.0,-*

Jumlah Aset Lancar KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp14.451.644.441,- Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0,-*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Per 31 Desember 2025 saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Provinsi Sulawesi Utara bersaldo Rp.0,-

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.13.702.021.108,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas lainnya dan setara Kas yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada 2024 No register 2VQWZG4A yang belum terealisasi, Pajak yang dipungut tetapi belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran.

Per 31 Desember 2025 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp.0,-

C.1.3 Belanja dibayar dimuka (prepaid)

*Belanja dibayar
dimuka Rp.0,-*

Nilai belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp749.089.333,-

C.1.4 Persediaan

Persediaan Rp.0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.534.000,-

Aset Tetap

Rp30.661.579.900,-

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.30.661.579.900,- dan Rp.31.852.602.142,-

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp22.916.146.000,-

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.22.916.146.000,- dan Rp.22.916.146.000,-

Tanah berlokasi di Jl. Diponegoro No.25, Mahakeret Timur Manado dengan luas tanah 2.212 m² sudah bersertifikat dengan sertifikat hak pakai Nomor 00023 an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal terbit 30 Juni 2022. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 4709/RT.02.1-SD/05/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Koreksi Perubahan Pencatatan Luas tanah, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan koreksi luas tanah, yang awalnya berdasarkan pembukuan luas 8.739 m² di koreksi luas sesuai sertifikat 2.212 m². Koreksi tidak mempengaruhi nilai perolehan.

Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2025	22.916.146.000
Mutasi Tambah :	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	-
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	22.916.146.000
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	22.916.146.000

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp.9.792.750.107,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar Rp.9.792.750.107,- dan Rp.10.320.097.583,-

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2025	10.320.097.583
Mutasi Tambah :	373.562.663
Pembelian (RPATA)	-
Pembelian dari dana Hibah	229.568.663
Reward Hibah	143.994.000
Mutasi Kurang :	900.910.139
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	900.910.139
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	9.792.750.107
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	6.712.289.256
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	3.080.460.851

Mutasi tambah peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Pembelian (Dari Dana Hibah Pilkada)

KODE BARANG	NAMA BARANG	UNIT	HARGA PER UNIT	JUMLAH
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	39.186.663	39.186.663
3.05.02.06.002	Televisi	1	10.128.000	10.128.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	1	17.500.000	17.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	1	19.758.000	19.758.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	4	17.094.000	68.376.000
3.10.01.02.002	Lap Top	1	29.500.000	29.500.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	5.919.000	17.757.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.663.000	3.663.000
3.10.02.04.001	Server	2	11.850.000	23.700.000
TOTAL				229.568.663

Reward Hibah sesuai BAST Nomor 61/BAST/MND/FSU/V/2024 dan Nomor 155/RT.01-BA/71/1/2024 tanggal 28 Mei 2024

KODE BARANG	NAMA BARANG	UNIT	HARGA PER UNIT	JUMLAH
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	1	143.994.000	143.994.000
TOTAL				143.994.000

**Gedung dan
Bangunan**
Rp.5.806.806.000,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.5.806.806.000,- dan Rp.5.806.806.000,-

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2025	5.806.806.000
Mutasi Tambah :	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	-
-	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	5.806.806.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	1.096.841.126
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	4.709.964.874

Aset Tetap Lainnya
Rp 1.000.000,-

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 1.000.000 dan Rp.1.000.000.

Aset tetap lainnya KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa CD/VCD dengan kode barang 6.01.02.01.003

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2025	1.000.000
Mutasi Tambah :	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	-
-	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	1.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	1.000.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.98.002.175,-.*

C.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp98.002.175,- dan Rp0.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara yang prosesnya masih sampai pada tahap konsultasi perencanaan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp (7.866.727.982),-.*

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(7.866.727.982) dan Rp(7.289.449.616). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.648.756.107	6.769.886.856	2.878.869.251
2	Gedung dan Bangunan	5.806.806.000	1.096.841.126	4.709.964.874
3	Aset Tetap Lainnya	1.000.000	0	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		15.456.562.107	7.866.727.982	7.589.834.125

Piutang Jangka Panjang
Rp92.029.812,-

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.11.251.802,- dan Rp.193.700.847,-

Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang pada KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan Piutang TP/TGR.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp135.391.291,-

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.135.391.291,- dan Rp.194.674.221,-

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Rp(114.355.804),-

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.(114.355.804),- dan Rp.(973.374),-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang

Aset Lainnya
Rp5.000.000,-.

C.4 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.195.580.378,-

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset lainnya pada KPU Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.4.1 Dana yang dibatasi penggunaannya

Dana Yang dibatasi
penggunaannya
Rp0,-.

Saldo dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.190.180.378,-

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang berada di rekening penampung Kementerian/Lembaga. Rekening penampung akhir tahun atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan batas akhir 31 Desember 2024 yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun 2025. RPATA diatur dalam PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

RPATA ini berupa pekerjaan rehabilitasi pagar kantor dengan CV Marina Bay sesuai Kontrak No 71/SPK/KPU-SULUT/XI/2024 tanggal 25 November 2024 senilai Rp.190.180.378,- dan telah dilakukan pembayaran di tahun 2025.

C.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp977.419.439,-

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.977.419.439,- dan Rp.76.509.300,-. Aset lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak

lagi digunakan dalam operasional KPU Provinsi Sulawesi Utara (Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp.17.251.300,- ; Aset Lainnya tak berwujud pada KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa software windows operation system dan windows server yang diadakan pada tahun 2010 yang sudah dihentikan penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.59.258.000,-; dan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp.900.910.139,- merupakan reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya (penghentian penggunaan dalam rangka penghapusan) berdasarkan surat KPU RI Nomor 4357/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Persetujuan penjualan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

*Akumulasi
Penyusutan dan
amortisasi asset
Lainnya
Rp.(972.419.439)*

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan dan amortisasi lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp.(972.419.439) dan Rp.(71.109.300).

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan & amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tdiak digunakan dalam operasi pemerintahan	918.161.439	913.161.439	5.000.000
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakn dalam Operasional Pemerintahan (Software)	59.258.000	59.258.000	0
Akumulasi Penyusutan		977.419.439	972.419.439	5.000.000

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp.0,-*

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas bulan) setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek KPU Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp.0,- dan Rp.299.776.553,-

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp.0,-*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0,-*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.183.479.762,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.0,-*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.116.296.791,- yang merupakan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hibah Pilkada), dimana per tanggal pelaporan, pajak tersebut belum di setor ke kas negara.

C.6 Ekuitas

*Ekuitas
Rp.30.677.831.702,-*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.30.677.831.702,- dan Rp.46.393.751.255,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.273.466,- dan Rp.17.573.227,-

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp.2.273.466,-

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Giro	19.745	354.210	-94,43
Pendapatan Denda penyelesaian pekerjaan	2.253.721	17.219.017	0,00
Jumlah	2.273.466	17.573.227	-87,06

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan berasal dari :

- Denda keterlambatan Rp.950.902,- atas Rehabilitasi Pagar Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara oleh CV MARINA BAY sesuai BAST/BAPP Nomor 1/BAST/KPU-SULUT/II/2025 Tanggal 24-01-2025, SP2D Nomor 259991302006364 tgl 6 Februari 2025
- Denda keterlambatan Rp.180.810,- atas pengadaan buku oleh PT Hikmah Media Nusantara sesuai BAST Nomor 12.A/BAST-SPK/KPU-SULUT/71/2025 tanggal 29 April 2025
- Denda keterlambatan Rp.177.459,- atas pengadaan buku oleh PT. Virzha Nusantara Informasi sesuai BAST Nomor 11.A/BAST-SPK/KPU-SULUT/71/2025 tanggal 5 Mei 2025
- Denda keterlambatan Rp.171.990,- atas pengadaan buku oleh CV. Paramadiva Global Multindo sesuai BAST Nomor 6.A/BAST-SPK/KPU-SULUT/71/2025 tanggal 5 Mei 2025
- Denda keterlambatan Rp.772.560,- (potongan SPM No 00439) atas Pengadaan pakaian dinas CPNS dan PPPK oleh CV. Delina sesuai BAST Nomor 34/BAST/KPU-SULUT/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.528.272.484,- dan Rp.5.342.456.007,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.710.021.700	1.633.513.400	4,68
Beban pembulatan gaji PNS	21.137	22.276	0,00
Beban Tunj Suami/istri PNS	101.164.682	102.455.540	-1,26
Beban Tunj. Anak PNS	29.198.196	29.196.402	0,01
Beban Tunj. Struktural PNS	126.140.000	125.010.000	0,90
Beban Tunj. Fungsional PNS	36.148.000	36.148.000	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	16.238.822	31.627.976	-48,66
Beban Tunj. Beras PNS	81.472.500	79.734.420	2,18
Beban Uang Makan PNS	236.022.000	32.566.000	624,75
Beban Tunjangan Umum PNS	59.975.000	52.030.000	15,27
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.349.381.950	1.306.406.688	3,29
Beban Gaji Pokok PPPK	358.603.332	57.664.800	521,88
Beban pembulatan gaji PPPK	4.311	278	0,00
Beban Tunj Suami/istri PPPK	14.985.360	0	0,00
Beban Tunj. Anak PPPK	3.137.486	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	22.500.000	7.500.000	200,00
Beban Tunj. Beras PPPK	18.153.280	1.303.560	1292,59
Beban Uang Makan PPPK	85.481.000	407.000	20902,70
Beban Tunjangan Umum PPPK	16.185.000	0	0,00
Beban Pegawai Tunjangan khusus/Kinerja PNS	1.987.117.083	1.802.477.824	10,24
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kinerja PPPK	276.321.645	44.391.843	522,46
Jumlah	6.528.272.484	5.342.456.007	22,20

**Beban
Persediaan**
Rp.0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.1.634.333.320,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

**Beban Barang
dan Jasa**
Rp.11.649.062.650,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.11.649.062.650,- dan Rp.60.515.200.651,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Penurunan beban jasa di karenakan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2025 hanya untuk kegiatan evaluasi.

Rincian Beban Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.615.937.927	8.758.725.614	-58,72
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96.286.000	181.309.000	-46,89
Beban Barang Operasional Lainnya	386.280.000	145.158.000	166,11
Beban Bahan	922.667.007	7.073.248.098	-86,96
Beban Honor Output Kegiatan	655.700.000	626.256.000	4,70
Beban Barang Non Operasional Lainnya	804.342.800	9.746.362.850	-91,75
Beban Langganan Listrik	172.288.259	195.594.932	-11,92
Beban Langganan Air	1.178.000	2.012.000	-41,45
Beban Jasa Konsultan	0	5.833.330.686	-100,00
Beban Sewa	1.841.392.323	8.611.913.664	-78,62
Beban Jasa Profesi	610.570.000	2.380.635.000	-74,35
Beban Jasa Lainnya	2.542.420.334	16.960.654.807	-85,01
Jumlah	11.649.062.650	60.515.200.651	-80,75

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan
Rp.797.876.223,-**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.797.876.223,- dan Rp.1.126.487.410,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama, dan adanya renovasi kantor

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413.243.595	994.579.985	-58,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384.632.628	131.907.425	0,00
Jumlah	797.876.223	1.126.487.410	-29,17

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.6.548.981.121,-**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.548.981.121,- dan Rp.34.359.793.943,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi, konsultasi ke KPU RI, monitoring kab/kota yang meningkat untuk menunjang terlaksananya tahapan Pemilu 2024

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.017.556.121	21.258.982.333	-71,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	960.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	531.425.000	13.099.851.610	-95,94
Jumlah	6.548.981.121	34.359.793.943	-80,94

Beban**Penyusutan****dan Amortisasi****Rp.1.449.789.705**

,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.449.789.705,- dan Rp1.380.812.757,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.320.349.572	1.245.559.124	6,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129.040.133	129.040.133	-
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	400.000	400.000	-
Jumlah Penyusutan	1.449.789.705	1.374.999.257	5,44
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		5.813.500	(100,00)
Jumlah Amortisasi	-	5.813.500	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.449.789.705	1.380.812.757	5,00

Beban**Penyisihan****Piutang Tak****Tertagih****Rp172.279.360,-****D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.172.279.360,- dan Rp.(990),-.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode

Surplus/defisit dari Kegiatan Non**Operasional****Rp245.347.168,-****D.9 Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Jumlah Pos Surplus kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.245.347.168,- dan Rp.23.097.990,- Pos Surplus dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Untuk KPU Prov Sulut Surplus dari kegiatan non operasional berasal dari setoran PNBK yang

menggunakan akun penerimaan Kembali beban barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN Kegiatan Non Operasional	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara	170.000	-	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	1.000.000	-	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	244.711.168	28.557.096	756,92
Beban Persediaan Rusak/usang	534.000	5.459.106	(90,22)
Jumlah Beban Penyisihan	245.347.168	23.097.990	962,20

Pos Luar Biasa Rp.0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

*Surplus/deficit LO
(Rp26.879.625.794,-)*

D.11 Surplus/ defisit LO

Nilai Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.(26.879.625.794),- dan Rp.(104.318.411.881),- (*didapat dari jumlah pendapatan dikurangi beban ditambah surplus dari kegiatan non operasional*).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp.46.393.751.255,-</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.46.393.751.255,- dan Rp. 31.130.584.634,-
<i>Defisit LO</i> <i>Rp.26.898.640.909,-</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.26.898.640.909,- dan Rp.104.318.411.881,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi</i> <i>Rp.0,-</i>	E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,-
<i>Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas</i> <i>Rp(3.890.687.185), -</i>	E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(3.890.687.185),- dan Rp0,- Koreksi yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(4.005.882.385),- merupakan koreksi lain-lain yang berasal dari Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (pengajuan SP4HL) dan koreksi nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp.115.195.200,-
<i>Transaksi antar entitas</i> <i>Rp.15.169.588.626,-</i>	E.5 Transaksi antar entitas Transaksi antar entitas merupakan akun penyeimbang surplus/defisit LO atau selisih transaksi masuk ditambah ditagihkan ke entitas lain dikurangi transfer keluar dan diterima dari entitas lain :

Transfer masuk	Rp. 23.512.850
Ditagih ke entitas lain	Rp. 15.418.129.260
Pengesahan Hibah	<u>Rp. 0 +</u>
	Rp. 15.441.642.110

Dikurangi :

Transfer keluar	Rp. 11.304.350 -
Diterima dari entitas lain	<u>Rp. 260.749.134 -</u>
Transaksi antar entitas	Rp. 15.169.588.626

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.30.774.011.787,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.30.774.011.787,- (didapat dari ekuitas awal dikurangi defisit LO ditambah transaksi antar entitas)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada tanggal 3 Januari 2025, berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 1 TAHUN 2025 Tentang Penetapan Pejabat dan staf pengelola keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 KPU Provinsi Sulawesi Utara ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Meidy Malonda
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rudy Lalonsang
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ferdynand Raintung
Bendahara Pengeluaran	: Riki Mangole

F.3 REKENING PEMERINTAH

- Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah Bank Mandiri Cabang Manado dengan nomor rekening virtual 810012654514000 atas nama BPG 049 KPU Prov Sulut.
- Rekening Pemerintah yang digunakan untuk menampung dana hibah Pilkada 2024 (yang dikelola oleh Bendahara Pembantu) adalah Bank Tabungan Negara dengan nomor 01101300007755 atas nama RPL 049 MITRA KPU PROV SULUT NR 2VQWZG4A (rekening sudah di tutup)
- Rekening Pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah Pilkada 2024 (yang dikelola oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran) adalah Bank Tabungan Negara dengan nomor 01101300007771 atas nama RPL 049 PDH MITRA KPU PROV SULUT NR 2VQWZG4A (rekening sudah ditutup)

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 654514

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 12:19 PM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	260,749,134	260,749,134	0	0	46,328,323	(46,328,323)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	260,749,134	260,749,134	0	0	46,328,323	(46,328,323)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	260,749,134	260,749,134	0	0	46,328,323	(46,328,323)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	25,014,989,000	24,997,971,192	(17,017,808)	100	125,304,060,000	111,673,943,191	13,630,116,809	89
1. Belanja Pegawai	6,531,929,000	6,528,272,484	(3,656,516)	100	5,346,643,000	5,346,560,007	82,993	100
2. Belanja Barang	18,252,016,000	18,240,130,045	(11,885,955)	100	117,476,917,000	104,599,287,644	12,877,629,356	89
3. Belanja Modal	231,044,000	229,568,663	(1,475,337)	99	2,480,500,000	1,728,095,540	752,404,460	70
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU PROVINSI SULAWESI UTARA 654514

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:19 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	25,014,989,000	24,997,971,192	(17,017,808)	100	125,304,060,000	111,673,943,191	13,630,116,809	89
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Manado, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris
MEIDY RONNY MALONDA
NIP. 196905141997021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:19 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	13,702,021,108	(13,702,021,108)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	749,089,333	(749,089,333)	(100.00)
Persediaan	0	534,000	(534,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	14,451,644,441	(14,451,644,441)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	22,916,146,000	22,916,146,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	9,792,750,107	10,320,097,583	(527,347,476)	(5.11)
Gedung dan Bangunan	5,806,806,000	5,806,806,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,000,000	1,000,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98,002,175	98,002,175	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,866,727,982)	(7,289,449,616)	(577,278,366)	7.92
JUMLAH ASET TETAP	30,747,976,300	31,852,602,142	(1,104,625,842)	(3.47)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	135,391,291	194,674,221	(59,282,930)	(30.45)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(114,355,804)	(973,374)	(113,382,430)	11,648.39
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	21,035,487	193,700,847	(172,665,360)	(89.14)
Piutang Jangka Panjang lainnya	60,272,580	0	60,272,580	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(60,272,580)	0	(60,272,580)	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	21,035,487	193,700,847	(172,665,360)	(89.14)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	190,180,378	(190,180,378)	(100.00)
Aset Lain-lain	977,419,439	76,509,300	900,910,139	1,177.52
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(972,419,439)	(71,109,300)	(901,310,139)	1,267.50
JUMLAH ASET LAINNYA	5,000,000	195,580,378	(190,580,378)	(97.44)
JUMLAH ASET	30,774,011,787	46,693,527,808	(15,919,516,021)	(34.09)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	183,479,762	(183,479,762)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	116,296,791	(116,296,791)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	299,776,553	(299,776,553)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	299,776,553	(299,776,553)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,774,011,787	46,393,751,255	(15,619,739,468)	(33.67)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:19 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	30,774,011,787	46,393,751,255	(15,619,739,468)	(33.67)
JUMLAH EKUITAS	30,774,011,787	46,393,751,255	(15,619,739,468)	(33.67)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,774,011,787	46,693,527,808	(15,919,516,021)	(34.09)

Keterangan :
FINAL

Manado, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

MEIDY RONNY MALONDA
NIP 196905141997021001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
 SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 12:16 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,273,466	17,573,227	(15,299,761)	(87.063)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,273,466	17,573,227	(15,299,761)	(87.063)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,273,466	17,573,227	(15,299,761)	(87.063)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,528,272,484	5,342,456,007	1,185,816,477	22.196
Beban Persediaan	0	1,634,333,320	(1,634,333,320)	(100)
Beban Barang dan Jasa	11,649,062,650	60,515,200,651	(48,866,138,001)	(80.75)
Beban Pemeliharaan	797,876,223	1,126,487,410	(328,611,187)	(29.171)
Beban Perjalanan Dinas	6,548,981,121	34,359,793,943	(27,810,812,822)	(80.94)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:16 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,449,789,705	1,380,812,757	68,976,948	4.995
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	172,279,360	(990)	172,280,350	(17,402,055.5
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	27,146,261,543	104,359,083,098	(77,212,821,555)	(73.988)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,143,988,077)	(104,341,509,871)	77,197,521,794	(73.985)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	245,347,168	23,097,990	222,249,178	962.201
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	245,881,168	28,557,096	217,324,072	761.016
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	534,000	5,459,106	(4,925,106)	(90.218)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	245,347,168	23,097,990	222,249,178	962.201
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(26,898,640,909)	(104,318,411,881)	77,419,770,972	(74.215)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(26,898,640,909)	(104,318,411,881)	77,419,770,972	(74.215)

Keterangan :

FINAL

Manado, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



MEIDY RONNY MALONDA

NIP 196905141997021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:18 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	46,393,751,255	31,130,584,634	15,263,166,621	49.03
SURPLUS/DEFISIT-LO	(26,898,640,909)	(104,318,411,881)	77,419,770,972	(74.21)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,890,687,185)	0	(3,890,687,185)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	115,195,200	0	115,195,200	0
LAIN-LAIN	(4,005,882,385)	0	(4,005,882,385)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,169,588,626	119,581,578,502	(104,411,989,876)	(87.31)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(15,619,739,468)	15,263,166,621	(30,882,906,089)	(202.34)
EKUITAS AKHIR	30,774,011,787	46,393,751,255	(15,619,739,468)	(33.67)

Keterangan :

FINAL

Manado, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

MEIDY RONNY MALONDA

NIP 196905141997021001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 1700 SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : 654514 KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl. Cetak 04/05/2026 12:56 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	116,296,791	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	13,585,724,317	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	749,089,333	0
0.0	117131	Bahan Baku	534,000	0
0.0	131111	Tanah	22,916,146,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,320,097,583	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,806,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,000,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	98,002,175	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,321,648,623
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	967,800,993
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	194,674,221	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	973,374
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	190,180,378	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	17,251,300	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	59,258,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,851,300
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	59,258,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	31,335,460
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	152,144,302
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	116,296,791
0.0	391111	Ekuitas	0	46,393,751,255
JUMLAH			54,055,060,098	54,055,060,098

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	22,916,146,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,792,750,107	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,806,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,000,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	98,002,175	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,769,886,856
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,096,841,126
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	135,391,291	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	60,272,580	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	114,355,804
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	60,272,580
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	918,161,439	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	59,258,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	913,161,439
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	59,258,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,418,129,260
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	260,749,134	0
0.0	313211	Transfer Keluar	11,304,350	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,512,850
0.0	391111	Ekuitas	0	46,393,751,255
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	115,195,200
0.0	391119	Koreksi Lainnya	4,005,882,385	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	19,745
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	170,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,253,721
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	244,711,168
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,710,021,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,137	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101,164,682	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	29,198,196	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	126,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36,148,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	16,238,822	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	81,472,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	236,022,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	59,975,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,349,381,950	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	358,603,332	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,311	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,985,360	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,137,486	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	22,500,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	18,153,280	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	85,481,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	16,185,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,987,117,083	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	276,321,645	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,615,937,927	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96,286,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	386,280,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	922,667,007	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	655,700,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	804,342,800	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	172,288,259	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,178,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,841,392,323	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	610,570,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,542,420,334	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,243,595	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384,632,628	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,017,556,121	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	531,425,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,320,349,572	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129,040,133	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	400,000	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	172,279,360	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	534,000	0
JUMLAH			71,212,519,004	71,212,519,004

Keterangan :

FINAL

Manado, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



MEIDY RONNY MALONDA
NIP. 196905141997021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:27 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	24,997,971,192
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	260,749,134	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	19,745
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	12,764,500
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,253,721
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	244,711,168
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,710,021,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,486	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101,164,682	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,198,196	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	126,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	36,148,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16,238,822	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,472,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	236,022,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,975,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,349,381,950	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	358,603,332	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,311	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,985,360	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,137,486	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	22,500,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,153,280	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	85,481,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	16,185,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,987,117,083	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	276,321,645	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,615,937,927	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	96,286,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	386,280,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	922,667,007	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	655,700,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	804,342,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	172,288,259	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,178,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,092,302,990	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 12:27 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	610,570,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,542,420,334	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	375,207,519	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384,632,628	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,029,249,681	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	551,135,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229,568,663	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	349
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	68,100
JUMLAH			25,258,788,775	25,258,788,775

Keterangan :
FINAL

Manado, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris
MEIDY RONNY MALONDA
196905141997021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1700 **SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA : 654514 **KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 04/05/26 12:43 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	19,745	0	19,745	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	12,764,500	0	12,764,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	12,784,245	0	12,784,245	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,253,721	0	2,253,721	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	2,253,721	0	2,253,721	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,000,000	0	1,000,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	244,711,168	0	244,711,168	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	245,711,168	0	245,711,168	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	260,749,134	0	260,749,134	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	260,749,134	0	260,749,134	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1700 **SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA : 654514 **KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 12:42 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,159,275,000	1,710,022,000	1,710,021,700	0	1,710,021,700	100	300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	24,000	21,486	349	21,137	88.07	2,863
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98,522,000	101,182,000	101,164,682	0	101,164,682	99.98	17,318
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,680,000	29,210,000	29,198,196	0	29,198,196	99.96	11,804
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	145,600,000	126,140,000	126,140,000	0	126,140,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	36,148,000	36,148,000	36,148,000	0	36,148,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,800,000	16,240,000	16,238,822	0	16,238,822	99.99	1,178
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,069,000	81,569,000	81,472,500	0	81,472,500	99.88	96,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	200,000,000	238,485,000	236,022,000	0	236,022,000	98.97	2,463,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51,870,000	59,975,000	59,975,000	0	59,975,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,800,985,000	2,398,995,000	2,396,402,386	349	2,396,402,037	99.89	2,592,963
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,322,650,000	1,349,382,000	1,349,381,950	0	1,349,381,950	100	50
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,322,650,000	1,349,382,000	1,349,381,950	0	1,349,381,950	100	50
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	89,712,000	358,604,000	358,603,332	0	358,603,332	100	668
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50,000	10,000	4,311	0	4,311	43.11	5,689
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	100,000	15,000,000	14,985,360	0	14,985,360	99.9	14,640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	100,000	3,200,000	3,137,486	0	3,137,486	98.05	62,514
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,120,000	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,030,000	18,200,000	18,153,280	0	18,153,280	99.74	46,720
511628	Belanja Uang Makan PPPK	30,000,000	86,398,000	85,481,000	0	85,481,000	98.94	917,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5,000,000	16,200,000	16,185,000	0	16,185,000	99.91	15,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	142,112,000	520,112,000	519,049,769	0	519,049,769	99.8	1,062,231
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,848,000,000	1,987,118,000	1,987,117,083	0	1,987,117,083	100	917
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	98,000,000	276,322,000	276,321,645	0	276,321,645	100	355
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,946,000,000	2,263,440,000	2,263,438,728	0	2,263,438,728	100	1,272
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,211,747,000	6,531,929,000	6,528,272,833	349	6,528,272,484	99.94	3,656,516
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,293,080,000	3,615,942,000	3,615,937,927	0	3,615,937,927	100	4,073

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1700
SATUAN KERJA : 654514
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SULAWESI UTARA
KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 12:42 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146,640,000	96,286,000	96,286,000	0	96,286,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	91,496,000	386,280,000	386,280,000	0	386,280,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,531,216,000	4,098,508,000	4,098,503,927	0	4,098,503,927	100	4,073
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	922,746,000	922,667,007	0	922,667,007	99.99	78,993
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	655,700,000	655,700,000	0	655,700,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	804,343,000	804,342,800	0	804,342,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	2,382,789,000	2,382,709,807	0	2,382,709,807	100	79,193
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	216,000,000	177,171,000	172,288,259	0	172,288,259	97.24	4,882,741
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	3,381,000	1,178,000	0	1,178,000	34.84	2,203,000
522141	Belanja Sewa	9,450,000,000	1,092,303,000	1,092,302,990	0	1,092,302,990	100	10
522151	Belanja Jasa Profesi	0	610,570,000	610,570,000	0	610,570,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	60,000,000	2,543,368,000	2,542,420,334	0	2,542,420,334	99.96	947,666
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,738,000,000	4,426,793,000	4,418,759,583	0	4,418,759,583	99.82	8,033,417
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110,994,000	378,803,000	375,207,519	0	375,207,519	99.05	3,595,481
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94,000,000	384,694,000	384,632,628	0	384,632,628	99.98	61,372
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	204,994,000	763,497,000	759,840,147	0	759,840,147	99.52	3,656,853
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,000,000	6,029,294,000	6,029,249,681	68,100	6,029,181,581	100	112,419
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	551,135,000	551,135,000	0	551,135,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,000,000	6,580,429,000	6,580,384,681	68,100	6,580,316,581	100	112,419
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,479,210,000	18,252,016,000	18,240,198,145	68,100	18,240,130,045	99.93	11,885,955
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	231,044,000	229,568,663	0	229,568,663	99.36	1,475,337
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	231,044,000	229,568,663	0	229,568,663	99.36	1,475,337
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	231,044,000	229,568,663	0	229,568,663	99.36	1,475,337
	JUMLAH BELANJA	20,690,957,000	25,014,989,000	24,998,039,641	68,449	24,997,971,192	99.93	17,017,808



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KPPN MANADO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 654514 - KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/02/26 8:37
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,014,989,000	25,014,989,000	0
2	Belanja	24,998,039,641	24,998,039,641	0
3	Pengembalian Belanja	-68,449	-68,449	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	260,749,134	260,749,134	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
 Eselon I : Komisi Pemilihan Umum
 Wilayah : KPU Provinsi Sulawesi Utara
 Satuan Kerja : KPU Provinsi Sulawesi Utara
 No. Dokumen : 010 dan 011
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan :

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Peralatan Mesin yang belum diregister
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Lainnya.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	Kode Akun	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522141	Belanja Sewa	2.833.333	
	K	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka		2.833.333
2	D	522141	Belanja Sewa	312.000.000	
	K	114112	Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka		312.000.000

Uraian:

- Jurnal Penyesuaian Untuk Sewa Gudang sesuai SPK 164/SPK/71/KPU-SULUT/2024 tanggal 4 November 2023 senilai Rp34.000.000
- Jurnal Penyesuaian Untuk Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II Surat Pesanan (Katalog Elektronik) #EP-01JSR0XH99KGG45DYDK1HK8CVX tanggal 28 April 2025 senilai Rp702.000.000,00

Disetujui oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Meidy R. Malonda

Dibuat/Direkam Oleh :
 Operator SAKTI

Oktaviani Makal



**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TA 2025 AUDITED**

Kode dan Nama UAKPA : (654514) KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kode dan Nama UAPPAW : (1700) SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
	a. Pagu/DIPA		✓
	b. Estimasi PNPB		✓
	c. Belanja		✓
	d. Pengembangan Belanja		✓
	e. Pendapatan		✓
	f. Pengembangan Belanja		✓
	g. Kas BLU		✓
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓
	i. Kas Hibah		✓
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/1719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Plta Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak

	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	✓		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Pyenyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	✓ ✓ ✓		Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	✓ ✓		Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)		✓ ✓	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓ ✓ ✓		Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya/Tidak Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya/Tidak Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA , serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk				
Mengetahui Penyusun LK  Oktavian Makal NIP 198610162014021001		 Manado, 4 Mei 2026 Penelaah,  Vanda Surentu NIP 198603222009022009		